

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era demokrasi saat ini, terutama dalam rangka menyambut pesta demokrasi seperti pilukada (pilkada) serentak yang diselenggarakan selama ini di Indonesia, tentu pendidikan politik kepada masyarakat merupakan bagian penting yang tak boleh dipisahkan dari proses pilkada yang diselenggarakan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemberian pemahaman terhadap politik kepada masyarakat akar rumput merupakan tanggung jawab yang tak terpisahkan dari proses pilkada yang diselenggarakan selama ini.

Sejak reformasi 1998 di Indonesia, maka krang demokrasi mulai terbuka. Salah satu perubahan besar yang terjadi, yaitu pemilihan presiden wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia dilakukan pemilu secara langsung, di mana masyarakat memilih secara langsung pemimpinnya tanpa harus diwakili oleh DPR seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya di masa Orde Baru (Orba).

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung ini tentu masyarakat perlu mendapatkan pemahaman dan pendidikan politik yang baik, sehingga dapat menentukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Tak hanya itu, masyarakat dapat memahami secara baik sistem pemilihan yang dilakukan dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten/kota masing-masing. Dengan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat tentu akan dapat melahirkan pilukada yang jujur, bersih, adil

dan damai. Pilkada yang dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. (J.Kritiadi, 1997:1).

Pilkada tidak boleh dianggap sebagai sarana politik semata dalam memilih pemimpin setiap lima tahun sekali atau dianggap sebagai pertarungan antara para partai politik (parpol), tetapi pilkada harus memberikan pemahaman politik kepada masyarakat sebagai konstituen yang akan memilih calon pemimpinnya di daerahnya masing-masing. Dengan begitu pilkada yang diselenggarakan oleh penyelenggara politik akan memberikan kepuasan positif kepada masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan pemimpin di daerahnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

Utsman Abdul Mu'iz Ruslan menjelaskan pendidikan politik sebagai suatu upaya oleh para lembaga pendidikan formal atau pun informal dengan tujuan membentuk kepribadian politik setiap warga negara menjadi sadar dalam menumbuhkan kemampuannya dalam berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian, pendidikan politik harus diberikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan para peserta pemilu dalam hal ini Partai Politik (Parpol) sebagai pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berada di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pilkada seperti KPU, Bawaslu, Parpol dan para calon kandidat tentu akan memberikan wawasan yang lebih konstruktif dalam membangun partisipasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pilkada yang diselenggarakan. Tak hanya itu, para konstituen sebagai pemilih dalam pilkada akan mampu menggunakan haknya sebaik-baik

mungkin untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan dan tidak berdasarkan eko sectoral semata.

Di Provinsi Papua sendiri pendidikan politik kerab kali di lakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, Parpol dan Kesbagnpol mewakili pemerintah di daerah. Hal ini bertujuan agar partisipasi pemilih dalam pemilukada di masing-masing daerah di Papua bisa dapat mencapai target atau partisipasi pemilih dalam pemilukada bisa tinggi di Provinsi Papua.

Dikutip dari *bawaslu.go.id* menyebutkan bahwa meskipun terjadi berbagai masalah selama pemilukada serentak tahun 2018 di Papua, tetapi menariknya Papua adalah provinsi engan persentase partisipasi pemilih tertinggi berdasarkan data Bawaslu dalam laporan pengawasn proses pilkada serentak 2018. Jumlah masyarakat Papua yang menggunakan hak pilih tercatat 2,91 juta pemilih, atau 84% (persen) dari total jumlah pemilih hak suara yang mencapai 3,4 juta lebih. Dengan demikian, partisipasi pemilih dalam pemilukada di Papua tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Papua.

Sementara itu, di lansir dari *rri.co.id* KPU Provinsi Papua menyebutkan bahwa angka partisipasi pemilih dalam pemilukada serentak tahun 2019 mencapai 90% (persen). Jumlah partisipasi pemilih dalam pemilukada ini diu

ngkap cukup tinggi di bandingkan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Jumlah partisipasi yang tinggi di Papua ini tidak terlepas dari pendidikan politik yang diberikan oleh para penyelenggara, baik KPU, Baswalu, Kesbangpol dan Partai Politik (Parpol) sebagai peserta dalam pemilukada yang dilaksanakan di berbagai daerah di Provinsi Papua secara serentak.

Di tulis oleh *pasificpos.com* bahwa KPU Kabupaten Waropen pada tanggal 15 Oktober 2020 telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan menyalurkan hak pilihnya dalam pemilukada calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Waropen. DPT yang berhasil ditetapkan oleh KPU dalam pemilukada serentak di Kabupaten Waropen sebanyak 38.263 jiwa yang tersebar di 11 distrik, yaitu Distrik Waropen Bawah, Masirei, Risei Sayati, Urei Faisei, Inggerus, Kirihi, Oudate, Wapoga, Demba, Wonti dan Distrik Sayoi Mambai.

Dari 11 distrik ini, penulis akan melihat pendidikan politik yang dilakukan para penyelenggara pemilukada di Kabupaten Waropen yang ada di 11 distrik, salah satunya yang akan menjadi fokus peneliti adalah Distrik Wonti untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pemilukada yang dilaksanakan secara serentak di Distrik Wonti, Kabupaten Waropen. Penulis akan melihat sejauh mana pendidikan politik yang dilakukan dalam partisipasi masyarakat di Distrik Wonti dalam memilih calon bupati dan wakil bupati dalam pemilukada serentak yang berlangsung di Kabupaten Waropen tahun 2020.

Berdasarkan hal ini, maka penulis akan meneliti tentang **“Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pelaksanaan 2020 (Studi Pemilukada di Distrik Wonti, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan dalam pemilukada di Distrik Wonti Kabupaten Waropen?
2. Bagaimana partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilukada di Distrik Wonti Kabupaten Waropen?

3. Faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada di Distrik Wonti Kabupaten Waropen?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bentuk pendidikan politik yang dilakukan dalam pemilukada di Distrik Wonti Kabupaten Waropen.
2. Untuk mengetahui partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilukada di Distrik Wonti Kabupaten Waropen.
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap pemilukada di Distrik Wonti Kabupaten Waropen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Mengingat pentingnya penelitian ini dalam berbagai faktor, maka manfaat penelitian ini ditinjau dari dua segi, yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun para pembaca, khususnya tentang Pentingnya Pendidikan Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020 Di Distrik Wonti Kabupaten Waropen.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori pembelajaran guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi program Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Cenderawasih (Uncen).
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan evaluasi bagi pendidikan politik dalam peningkatan partisipasi Pemilih untuk mengikuti proses pemilukada selanjutnya yang akan diselenggarakan di berbagai daerah yang ada di Papua. Masyarakat dapat memahami secara baik tentang proses demokrasi melalui pemilukada yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.

## **E. Tinjauan Pustaka (Tinjauan Teori)**

### **1. Konsep Pendidikan Politik**

Pendidikan politik sering juga disebut pembelajaran politik (political learning) atau sosialisasi politik (political socialization) ialah proses pembentukan serta pengembangan sikap dan perilaku politik. Pendidikan politik tidak dibatasi dalam pengertian formal politik, seperti keterlibatan dalam kampanye partai politik dan memberikan suara dalam pemilihan umum atau pilkada (Adelabu dan Akinsolu: 2009; Orit: 2004).

Pendidikan politik memberikan seseorang pengetahuan dan keterampilan untuk memahami persoalan politik dalam pengertian yang luas, termasuk pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman nilai sosial politik yang dianut seseorang dan kelompok (komunitas). Pendidikan politik menumbuhkan keterlibatan seseorang dalam diskusi politik dengan banyak orang; melakukan deliberasi tentang persoalan-persoalan kehidupan lainnya (luas). Pendidikan politik juga membuat seseorang mampu memberi pengaruh terhadap orang-orang tentang persoalan-persoalan politik (Adelabu dan Akinsolu: 2009; Clarke: 2007; Davies: 2005).

Dari pengertian tersebut, ada tiga misi atau fungsi utama pendidikan politik. *Pertama*, pendidikan politik ialah revitalisasi pemahaman tentang politik. Pendidikan politik bukan mengajarkan peserta didik tentang berapa kursi di badan legislatif, melainkan memberi pemahaman atau kesadaran kepada publik bahwa fungsi-fungsi kekuasaan itu sebagai aconstitutive force, bagaimana pembagian kekuasaan, pertarungan kekuasaan, serta bagaimana kekuasaan dimanfaatkan wakil rakyat dan untuk siapa (Ruitenber, na; Dumas dan Dumas: 1996; Davies: 2005).

*Kedua*, pendidikan politik ialah pendidikan emosi politik (educating political emotion). Dalam hal ini, emosi bukan dalam pengertian private domain, yaitu perasaan pribadi atau kelompok yang didasarkan pada konsepsi identitas diri. Namun, emosi dipahami dalam konteks tatanan sosial politik atau kolektif politik, yaitu pandangan terhadap hubungan sosial yang hegemonik. Dari fungsi ini, pendidikan politik ialah menumbuhkan dan mengembangkan rasa solidaritas, komitmen terhadap kelompok masyarakat yang tidak berdaya (tertindas), dan (meningkatkan) kemampuan melawan ketidakadilan.

*Ketiga*, pendidikan politik ialah mengembangkan melek politik atau kesadaran politik (political literacy). Melek politik mempunyai hubungan dengan keterampilan, isu dan aksi penerapan politik yang demokratis, serta pendidikan global, yaitu pembelajaran afektif dan pendekatan holistik tentang isu-isu dunia. Pendidikan kewargabangsaan yang berkaitan dengan kesukarelaan untuk berbuat sesuatu di masyarakat (Davies: 2005), kemampuan seseorang membaca landscape politik dalam konfigurasi pada era kini dan masa lalu (historisitas).

Holdar and Zakharchenko (ed) (2002) menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi. Giesecke (dalam Kartono 1989:30), pendidikan politik dapat dipahami dalam arti "*politische bildung ist bildungswissen, orientierungswissen, verhaltungswissen und aktionswissen*".

Pendidikan politik adalah *bildungswissen*, yakni bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (*mensbeeld*) serta pengembangannya dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga :

- 1) Orang menjadi sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri,
- 2) Sadar akan identitas bangsa sendiri,
- 3) Memiliki rasa percaya diri yang kuat,
- 4) Sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta dependensi pada kekuatan atau bangsa lain,
- 5) Memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup (dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa yakni hidup sejahtera.

Pendidikan politik dalam arti *orientierungswissen*, yaitu mampu berorientasi pada paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan dan umat manusia. Secara objektif orang harus berani melihat realitas nyata dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi-situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur deskriptif lainnya, sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang lebih baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan



bantu menuju pada keseimbangan dan keserasian hidup bersama. Pendidikan politik dalam arti *verhaltensweisen* adalah memahami hukum, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik, sehingga subjek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi dan kondisi politik sesaat.

Pendidikan politik dalam arti *aktionwissen* adalah, (1) mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar, sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, (2) disertai refleksi objektif, (3) wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pemawasan reflektif, serta membuahakan ide-ide dan aksi atau tindakan yang tepat, mantap untuk mengatasi semua kesulitan.

Politik sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. *Forming* mengandung makna bahwa pendidikan politik di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan *bildung* terkandung sebuah makna bahwa pendidikan politik adalah pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penung tanggung jawab untuk menjadi insan politik.

*R. Hajer* (dalam Kartono 1989:14) memandang pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Sementara itu, politik dipahami sebagai proses menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan di tengah masyarakat.

*Ruslan* (2000) memaknai pendidikan politik sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang

berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatannya, yang warga negara menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang itu kepribadian politik, kesadaran politik, partisipasi politik, lembaga-lembaga pendidikan, kultur politik, dan manusia atau warga negara.

#### 1) Perkembangan Pendidikan Politik.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan yang ada di negara tersebut.

Pemaparan di atas telah menggambarkan secara jelas bahwa terdapat hubungan yang erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menarik perhatian banyak kalangan.

#### 2) Perkembangan Pendidikan Politik di Indonesia.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik. Walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademik. Publikasi berbagai seminar ataupun diskusi yang mengangkat tema tentang pendidikan dan politik masih kurang terdengar. Andai pun ada, fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek substantif hubungan politik dan pendidikan, hanya masih di seputar aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Walaupun demikian, keyakinan akan adanya hubungan yang tak terpisahkan antara politik dan pendidikan sudah mulai terbentuk.

Mochtar Buchori (M. Shirozi, 2005:30) mengemukakan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang mendukung mulai berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pendidikan dan politik yaitu:

- 1) Adanya kesadaran tentang hubungan yang erat antara pendidikan dan politik.
- 2) Adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik.
- 3) Adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik.
- 4) Diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik.
- 5) Pentingnya pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Penjelasan Mochtar Buchori di atas menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik. Terdapat keyakinan yang sangat kuat bahwa melalui pendidikan dapat menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas. Paparan penjelasan di atas, pada akhirnya dapat menimbulkan satu pertanyaan mengenai hubungan pendidikan dengan politik. Akankah politik harus

memasuki wilayah pendidikan untuk menjalankan fungsi dan tujuannya dan juga sebaliknya? Melalui pendidikan seorang siswa akan paham secara tidak langsung mengenai seluk beluk politik. Begitu pula sebaliknya, bahwa dunia politik adalah salah satu sarana untuk rnengaplikasikan berbagai ilmu yang telah didapat siswa melalui dunia pendidikan. Para siswa tidak dapat acuh tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar dunia sekolahnya.

Sekiranya penjelasan di atas dapat menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang erat dan tak dapat dipisahkan antara pendidikan dan politik. Kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan saling membutuhkan satu sama lain. Untuk lebih jelas memahami kaitan antara pendidikan politik di jalur persekolahan, akan dipaparkan secara lebih lanjut mengenai konsep pendidikan politik dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam bahasan selanjutnya.

### 3) Landasan Hukum Pendidikan Politik.

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah sebagai berikut:

Landasan pendidikan politik di Indonesia terdiri dari:

- a. Landasan ideologis, yaitu Pancasila
- b. Landasan konstitusi, yaitu UUD 1945
- c. Landasan operasional, yaitu GBHN
- d. Landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945". Landasan yang tersebut di atas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting karena warga negara terutama siswa harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 1945.

#### 4) Fungsi Pendidikan Politik.

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik. Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

- a. Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan.
- b. Di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

##### 5) Tujuan Pendidikan Politik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik maka yang menjadi

landasan hukum pendidikan politik yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya aspek kognitif wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.

#### 6) Bentuk Pendidikan Politik.

Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan

di masyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini.

Bentuk pendidikan politik menurut *Rusadi Kartaprawira* (2004:56) dapat diselenggarakan antara lain melalui:

- a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
- b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
- c) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita lihat bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui verbagin jalur. Pemberian pendidikan politik tidak hanya dibatasi oleh lembaga seperti persekolahan atau organisasi saja, namun dapat diberikan melalui media, misalnya media cetak dalam bentuk artikel.

Apapun bentuk pendidikan politik yang akan digunakan dan semua bentuk yang disuguhkan di atas sesungguhnya tidak menjadi persoalan. Aspek yang terpenting adalah bahwa bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (senseof belonging) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.



Apabila diasosiasikan dengan bentuk politik yang tertera di atas, maka menurut penulis yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pendidikan politik terletak pada penyelenggaraan bentuk pendidikan politik yang terakhir yaitu melalui jalur lembaga atau asosiasi dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis sangat sependapat bila pendidikan politik lebih ditekankan melalui jalur pendidikan formal. Pendidikan politik formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui lembaga resmi (sekolah).

## **2. Konsep Partisipasi Pemilih.**

Dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang.

Adapun menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:

*Menurut Herbert McClosky*, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau secara tidak langsung, dalam proses kebijakan umum (the term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy).

*Menurut Samuel P. Huntington* Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi juga bisa bersifat individual dan kolektif,

terorganisir atau spontan, mantap, sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

*Menurut Samuel P. Huntington*, Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan Negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi politik. Berbagai macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan dan ketidakpuasan warga Negara.

**Tabel 1.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

<b>Konvensional</b>	<b>Non-konvensional</b>
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemokrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat poli	Tindak kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran)
Tik dan administrative	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) perang griliya dan revolusi

Adapun ciri-ciri sosial tertentu nampak sangat penting dalam memberikan kesempatan dan kecakapan politik kepada setiap individu. Pendidikan tinggi mempengaruhi partisipasi politik. Oleh sebab itu banyak Negara memperbaharui kurikulum sekolah untuk dapat mempengaruhi sosialisasi politik kaum muda. Orang yang berstatus sosial lebih tinggi lebih aktif. Partai politik berpengaruh besar dalam partisipasi politik. Ledakan tuntutan partisipasi adalah keyakinan yang tersebar luas bagi kaum muda terhadap demokratis partisipan. Dorongan utamanya karena di Negara demokratik pun para pengambil keputusan masih tetap orang – orang yang masih mapan (establishment). Oleh sebab itu para penganjur demokrasi partisipan agar para pembuat keputusan politik membawa permasalahan politik ke tingkat masyarakat umum agar masyarakat dapat menguasai masalah dan bertindak secara politik demi kepentingan mereka. Tipologi partisipasi politik. Secara umum tipologi partisipasi politik dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang bertoleransi pada proses input dan output. Artinya setiap warga Negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternative kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintahan.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang bertoleransi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

- 3) Golongan putih, (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.

Adapun menurut Milbrath dan Goel, partisipasi dibedakan menjadi:

- 1) Kelompok apatis, orang yang akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Spektator, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- 3) Gladiator, komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
- 4) Pengeritik, dalam bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Sedangkan Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Ia membagi partisipasi menjadi enam lapisan yaitu:

- 1) Pemimpin politik
- 2) Aktivitas politik
- 3) Komunikator
- 4) Warga masyarakat
- 5) Kelompok marginal dan
- 6) Kelompok terisolasi

### **3. Pengertian Pemilu**

Pemilihan umum di sebut juga dengan “political Market”(Dr. Indria Samego).Artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat

berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilihan (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya, spanduk, panflel, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pada pesan mengenai program, platform, asas, ideology serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilihan umum juga diartikan sebagai alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi juga harus menjamin sukseskan perjuangan orde baru yaitu, tetap tegaknya Pancasila dan pertahankan UUD 1945.

Asas-asas pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor. 08 tahun 2012, adalah sebagai berikut :

- 1) Umum artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih.

- 2) Langsung artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- 3) Bebas artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun /dengan apapun.
- 4) Rahasia artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya untuk kepada siapa siapa suaranya diberikan (secret ballot).

Asas pemilu Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 1999, Adalah sebagai berikut:

- 1) Jujur dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Adil dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari perlakuan kecurangan pihak manapun.
- 3) Langsung artinya pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa prantara.
- 4) Umum artinya semua warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa diskriminasi (pengecualian).

- 5) Bebas pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- 6) Rahasia artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

Asas pemilu menurut UU No. 06 Tahun 2004, tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU Nomor 06 Tahun 2004.

- 1) Langsung rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Umum semua warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- 3) Bebas rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- 4) Rahasia rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikannya.
- 5) Jujur dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaannya, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 6) Adil dalam penyelenggaraan pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Asas pemilu menurut UU Nomor. 06 Tahun 2020, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Asas pemilihan umum meliputi:

- 1) Langsung rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Umum semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk mengikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.
- 3) Bebas rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa ada pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- 4) Rahasia pemilih di jamin oleh praturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan oleh apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballof).
- 5) Jujur dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraaan pelaksanaan, pemerintah dan partaipolitik peserta pemilu, pengewan dan pemantaupemilu, termasuk pemili, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Adil dalam penyelenggaraaanpemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

#### **4. Sistem pemilu.**

Dalam ilmu politik dikenal dengan bermacam-macam system pemilihan umum, akakn tetapi umumnya berkaisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

- a. Single-member constituency (satu wakil yang biasa dikenal dengan sistem distrik.



- b. Multi-member constituency (satu daerah memilih memilih beberapa wakil, biasa dinamakan Proportional Representational atau perwakilan berimbang.

Secara umum system pemilihan umum dapat di klasifikasikan dalam dua system, yaitu:

1. Sistem Distrik

Sistem ini merupakan system pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas satu kesatuan geografis (yang biasa di sebut distrik karena kecilnya daerah yang di liputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan kekurangannya yaitu:

- a. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
- b. Sistem ini kurang representative dalam arti bagi calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan, maka ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan.

Disamping kekurangannya, adapun kelebihan dari sistem ini, yaitu;

- a. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.

- b. Sistem ini lebih mendorong proses integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan yang satu.
  - c. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.
  - d. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.
2. Sistem peraturan berimbang,

Sistem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Sistem perwakilan berimbang dipakai di negara luar, seperti Belanda, Swedia, Belgia, dan di Indonesia pada tahun 1955 dan 1971 dan 1976. Dalam sistem ini ada beberapa kelemahan;

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru.
- b. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya.
- c. Banyak partai mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil, karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

## **F. Definisi Konsep dan Operasional**

### **1. Definisi Konsep**

Berdasarkan penjelasan pada bagian kajian pustaka, maka dapat dirumuskan definisi konsep pada penelitian adalah;

- a. Pendidikan Politik adalah, bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader - kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pemilu, Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah kegiatan - kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau secara tidak langsung, dalam proses kebijakan umum.

## **2. Definisi Operasional**

### **1. Definisi konsep**

Berdasarkan penjelasan pada bagian kajian pustaka, maka dapat dirumuskan definisi konsep pada penelitian adalah;

- a. Pendidikan Politik adalah, bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader - kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pemilu, Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah kegiatan - kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau secara tidak langsung, dalam proses kebijakan umum.

### **2. Definisi Operasional**

Berdasarkan penjelasan pada bagian kajian pustaka, maka dapat dirumuskan definisi operasional pada penelitian adalah;

- a) Variabel Pendidikan politik dengan indikator-indikator sebagai berikut;
  1. Sosialisasi politik

Semakin tinggi sosialisasi politik terhadap masyarakat berarti semakin tinggi juga tingkat pengetahuan masyarakat terhadap politik.

2. Tingkat pendidikan individu

Semakin tinggi pendidikan masyarakat pengetahuannya terhadap politik juga semakin banyak.

b) Variabel partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan indikator - indikator sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan

Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu dengan memberikan dukungan dalam bentuk suara pada pemilihan umum.

2. Pemanfaatan

Dalam pemanfaatannya, masyarakat dapat berpartisipasi secara baik dan mengerti tentang pemilu.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah alat yang digunakan dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah. Metode ini diharapkan dapat membantu atau memperlancar jalannya sebuah riset, baik dalam pengumpulan data, pengolahan data sampai pada analisa data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian ini berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan objek yang diteliti dan dikaji oleh peneliti.

2. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan ( Nazir,1988:325 )

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berusia 17 tahun > yang berada di Distrik Wonti dengan jumlah penduduk 1359 jiwa dan DPT 800 jiwa.

b) Sampel adalah bagian dari populasi atau yang merupakan objek dari penelitian.

Dalam penelitian ini. Untuk dapat menetapkan berapa banyak unit pengamatan atau masyarakat yang akan dijadikan sampel penulis hanya mengambil setengah dari jumlah DPT sebanyak 400 orang dari jumlah populasi Distrik Wonti 1359, jiwa kemudian penulis mengambil setengah dari jumlah jumlah DPT diatas yaitu  $400:1/2 = 200$ , maka banyaknya sampel pada penelitian ini 200 orang. Selanjutnya teknik pengambilan dilakukan dengan cara purposive (bertujuan), dimana Purposive sampling merupakan pemilihan siapa subjek yang ada didalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena, itu menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu jadi dalam penelitian ini penulis memilih sendiri orang-orang yang dirasa dapat memberikan data (informasi) secara maksimal, diantaranya perwakilan dari :

- 1) Toko Pemuda : 40 orang
- 2) Toko Perempuan : 40 orang
- 3) Toko Agama : 40 orang
- 4) Toko Adat : 40 orang
- 5) Toko Pemerintah : 40 orang

Jumlah : 200 orang

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan penelitian banyak ditentukan oleh instrument yang digunakan, sebab data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian diperoleh melalui instrumen penelitian.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nana Sudjana dan Ibrahim (2007:96).

*<sup>1</sup> “instrument sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya.”*

Hal senada juga diungkap oleh Zainal Arifin (2011:225).

*<sup>2</sup> “instrument merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Mutu instrument akan menentukan mutu data yang digunakan dalam penelitian, sedangkan data merupakan dasar kebenaran empiric dari penemuan atau kesimpulan penelitian”*

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah;

#### a) Teknik Observasi ( Pengamatan )

Observasi adalah mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian pada lokasi penelitian.

---

<sup>1</sup>Nana Sudjana dan Ibraim (2007:96)

<sup>2</sup>Zainal Arifin (2011:225).h

b) Teknik Wawancara

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang di sebut responden melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi.

c) Angket (Kusioner)

Angket yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang telah disusun dan kemudian disebarakan kepada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Kusioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ketahui (Arikunto 2006:153). Sudjana dan Ibrahim (2007:102), menjelaskan bahwa:

*<sup>3</sup>“Wawancara dan kusioner sebagai alat pengumpul data digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain. Dari individu/responden. Caranya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan kepada individu oleh peneliti. Apabila pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara lisan, maka cara ini disebut wawancara. Bila pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan secara tertulis, disebut kusioner. Baik wawancara maupun kusioner sama-sama perlu dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang dibut oleh peneliti”.*

d) Studi Pustaka( Library Research ) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa buku, teori-teori dan referensi dari website yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>3</sup>Sudjana dan Ibrahim (2007:102)

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pemrosesan data (*data processing*) merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data. Istilah lain yang sering digunakan adalah preparasi data (*data preparation*), mengorganisasi data (*data reduction*). Pemrosesan data meliputi transformasi dari observasi yang di himpun dalam lapangan ke dalam satu sistem kategori dan menerjemahkan ke analisis kuantitatif. Kode kemudian dikode kembali untuk dapat digunakan ke pemrosesan data otomatis. Jadi, pemrosesan data atau pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di pahami. Proses transformasi data dilakukan melalui kegiatan penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), tabulasi (*tabulation*).

##### a) Penyuntingan (*Editing*)

Proses pemeriksaan kembali kualitas data dalam instrument dinamakan penyuntingan. Yang di periksa kembali adalah kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan relevansi.

##### 1) Kelengkapan

Kelengkapan data dalam penelitian dengan metode kusioner berkaitan dengan kelengkapan lembar kuesioner, identitas sumber data, dan kelengkapan pengisian instrumen.

##### 2) Akursi



Akurasi adalah berhubungan dengan kesesuaian antara pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang di peroleh.

3) Konsistensi

Konsistensi data berhubungan dengan kecocokan atau kesesuaian antara jawaban atau data yang satu dan data yang lainnya.

4) Keseragaman

Keseragaman data berarti data dicatat dalam satuan-satuan yang seragam. Ini dapat dilakukan jika ada keseragaman interpretasi pertanyaan, instruksi-instruksi, dan pencatatan.

5) Relevansi

Relevansi data menunjuk pada kesesuaian, baik kedalam maupun keluasan, antara data yang diperoleh dan hal yang dipertanyakan atau data yang dibutuhkan.

b) Pengkodean (*Coding*)

Pengodean sebagai satu proses mengklasifikasian tanggapan atau jawaban menjadi kategori yang lebih bermakna.

1) Tabulasi (Tabulation)

Tabulasi merupakan alat analisis atau sebagai alat untuk menyusun kategori ketika mengubah variabel rasio atau interval menjadi nominal atau ordinal atau berdasarkan indeks. Tabulasi kemudian digunakan untuk menciptakan stastitik deskriptif. Untuk menghitung presentase dan tiap kategori jawaban yang digunakan rumus Anto Dayan (1997:17)

$$P = \frac{F}{n} = x 100 \%$$

Keterangan:

P : Presentase

F : Frekuensi

N : Banyaknya jumlah data

100 : Nilai konstan

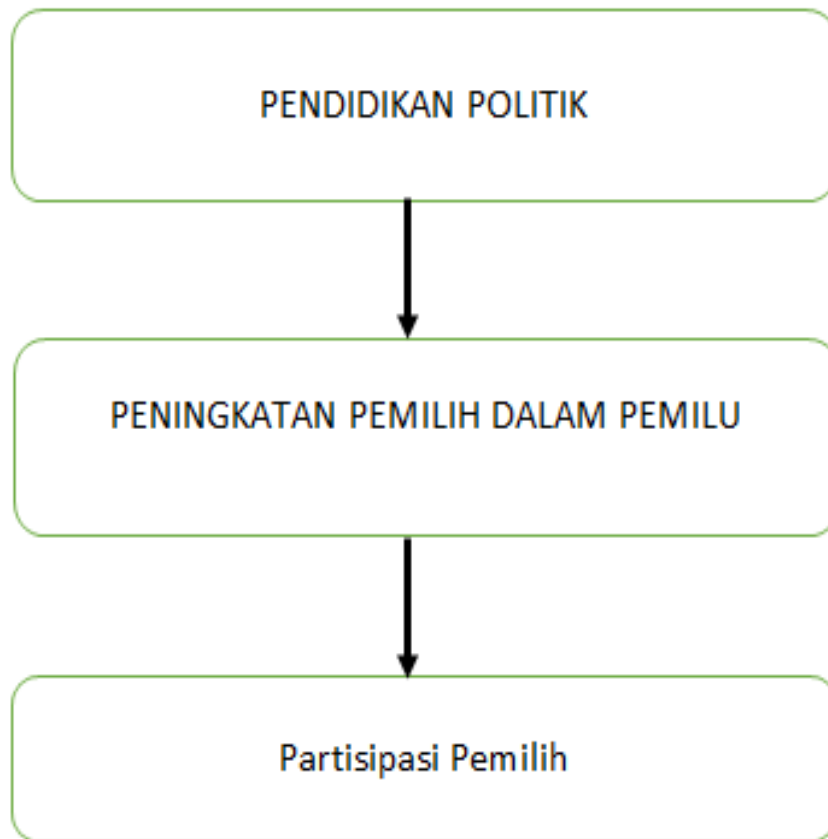
## 5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan metode “Deskriptif Analisi”.

Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan metode ini bertujuan menggambarkan secara objektif dalam rangka melakukan perbaikan terhadap masalah yang dihadapi sekarang. Serta melakukan pengukuran tingkat ketepatan dan kesesuaian terhadap teori yang diterapkan, khususnya pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat.

Adapun data yang di analisis oleh penulis diantaranya, sosialisasi politik, pendidikan individu yang adalah sebagai indicator dari variabel “Pendidikan Politik” sedangkan selain itu ada juga variabel “Partisipasi Masyarakat” dengan indikator pelaksanaan dan pemanfaatan.

## H. Kerangka Berpikir



**Keterangan:**

Pendidikan politik perlu dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, termasuk peserta pemilu, seperti misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbagnpol) mewakili pemerintah di daerah dan Partai Politik (Parpol) yang akan bertarung. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilukada yang akan diselenggarakan.

Jika pendidikan politik dilakukan dengan baik kepada masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam pilukada akan semakin meningkat. Hal ini lantaran

pendidikan politik yang dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat sebelum dilakukannya pemilukada. Namun, jika sebaliknya tidak ada pendidikan politik yang dilakukan, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap peningkatan pemilih dalam pemilukada yang diselenggarakan nantinya. Peningkatan pemilih dalam pemilukada dapat terjadi apabila pendidikan politik dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu secara terus menerus kepada masyarakat sebagai konstituen yang akan memilih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dalam kerangka berpikir ini bahwa jika pendidikan politik dilakukan secara baik dan terus menerus kepada masyarakat, maka peningkatan pemilih untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi pemilukada di setiap daerah akan semakin baik. Partisipasi masyarakat dalam pemilukada akan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh penyelenggara. Tidak hanya itu, warga akan ikut memberikan hak suaranya sesuai dengan hati nuraninya, serta ikut menjaga kedamaian pada saat pemilukada berlangsung.